

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2016-2021

Oleh:

RIZKY SYAFPUTRA, NOVLIZA EKA PATRISIA

**Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Bengkulu**

ABSTRACT

This research is the result of observations and interviews conducted by researchers to find out and analyze the Strategic Plan of North Bengkulu Regency. The formulation of the problem in this study is how the implementation of the Strategic Plan (Renstra) policy at the Public Works and Spatial Planning Office of North Bengkulu Regency 2016-2021 and see what are the inhibiting factors in the policy. The purpose of this research is to see the implementation of the Strategic Plan of the Public Works and Spatial Planning Office of North Bengkulu Regency in 2016-2021. Researchers used descriptive qualitative research methods. In this study the data used were primary and secondary data. Primary data is data taken directly at the Department of Public Works and Spatial Planning North Bengkulu Regency, while secondary data is obtained from other parties through interview techniques, observation, documentation and literature study. The results of this study show that the strategic planning policies at the Public Works and Spatial Planning Office are already running well in accordance with existing regulations, all strategic planning techniques are used to design activities for the next five years. In the target groups, the implementation of the Strategic Plan policy seems to have reached its objectives. The organization for implementing the Strategic Plan still has technical and administrative obstacles. The number of new regulations issued, the reduced funds proposed in the Renstra made the implementation of the Strategic Plan ineffective. There are still community groups that do not support the Renstra activities until the Renstra activities are hampered. thus reducing time efficiency for implementing Renstra activities.

Keywords: implementation, strategic planning, development.

PENDAHULUAN

Setiap organisasi perlu melakukan suatu perencanaan dalam setiap kegiatan organisasinya, sebab perencanaan merupakan proses dasar manajemen di dalam mengambil suatu keputusan dan tindakan. (Krisdayanti, 2018)

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara adalah dokumen perencanaan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan, serta disusun berdasarkan tugas pokok dan

fungsi SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara, yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Menurut Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara, pendekatan pelayanan public ke masyarakat secara langsung dengan pertimbangan jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah desa/kelurahan, sosial budaya dan pertimbangan sosial ekonomi lainnya. Sebagai salah satu SKPD, maka Dinas Pekerjaan Umum memiliki tugas pokok dan fungsi yang sama dengan SKPD lainnya yang mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2016

tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Rencana Strategis Kabupaten Bengkulu Utara mengalami perubahan pada tahun 2019. Yang mana kegiatan ini telah disusun didalam kegiatan perubahan kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016–2021. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bengkulu Utara mengatakan bahwa perubahan renstra yang di lakukan sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017.

Dalam kegiatan tersebut diagendakan unttuk menyusun rancangan awal untuk dikonsultasikan kepada public yang selanjutnya dimusyawarahkan secara bersama. Tujuan dari RPJMD ini untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi serta kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, indicator sasaran, arah kebijakan RPJMD tersebut. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa (1) Secara gradasi penyusunan visi, misi, tujuan, sasaran, indicator sasaran, strategi, arah kebijakan belum mencerminkan pola efektif, (2) Capaian renstra masih rendah dan kesulitan pengukurannya, (3) Capaian IKU dan IKK masih belum mencapai target, (4) Pelaksanaan program/kegiatan belum sepenuhnya mendukung pencapaian indicator kinerja sasaran RPJMD, dan (5) Penyusunan RPJMD belum sepenuhnya berpedoman pada Permendari Nomor 86 Tahun 2017 (Penasumatera.co.id).

Pemaparan informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) yang disusun sebelumnya tidak sesuai dengan keadaan yang dibutuhkan di Kabupaten Bengkulu Utara.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis akan menganalisis Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) yang diberi judul

“Analisis Implementasi Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016–2021”.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2012:86) menjelaskan bahwa “Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara satu dengan variabel yang lain”.

Jadi penelitian kualitatif merupakan suatu proses pengamatan dan analisis dari suatu peristiwa tertentu yang menghasilkan diskriptif berupa kata-kata atau lisan dari peristiwa yang diamati (Sugiyono, 2011:19-20). Pada umumnya penelitian kualitatif tidak memerlukan hipotesis, sehingga dalam penelitian ini tidak memerlukan hipotesis (Arikunto, 2010:245). Tujuannya adalah untuk menjelaskan suatu objek secara relevan dengan fenomena yang diamati dan menjelaskan karakteristik masalah yang ada.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan

Kebijakan yang disesuaikan merupakan pola interaksi yang digagas oleh perumus kebijakan dengan tujuan untuk mendorong, mempengaruhi dan merangsang target group untuk melaksanakannya. Dari pengertian tersebut pola interaksi yang digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara selaku implementor kebijakan Renstra. Kebijakan yang terkait dengan penyusunan Renstra pasti mengikuti beberapa aturan yang ada. Dinas PUPR

merupakan OPD yang menaungi sarana prasarana dasar kebutuhan masyarakat. Terkait dengan pembangunan jalan, pembangunan jembatan, kebutuhan air bersih sampai dengan ranah rumah layak huni.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tujuan dasar untuk meningkatkan sarana dan prasarana wilayahnya dan Renstra adalah dasar kerja Dinas Pekerjaan Umum dalam jangka 5 tahun untuk menentukan sasaran strategis untuk program dan kebijakan dan teknis penyusunan Renstra. Banyak tahapan yang dilakukan dalam penyusunan Renstra antaranya yaitu menyiapkan tim penyusunan Renstra yang dibentuk di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk mengkaji anggaran lima tahun ke depan.

Renstra disusun berdasarkan isu-isu yang ada, mulai dari isu nasional sampai ke isu-isu yang ada di kabupaten hingga desa. Dari penyusunan Renstra ini melibatkan semua bidang yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan sasaran setiap bidang dan termasuk visi, misi kepala daerah. Implementasi kebijakan Renstra di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sudah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada, semua teknik perancangan Renstra untuk merancang kegiatan untuk lima tahun ke depan sudah dilaksanakan dan semua rancangan Renstra memasukan semua isu-isu yang ada di masyarakat mulai dari isu nasional hingga isu-isu strategis yang ada di daerah hingga desa sesuai dengan visi misi kepala daerah terpilih.

Implementasi Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran merupakan bagian dari *policy stake holders* yang diharapkan dapat mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan. Karena kelompok ini menjadi sasaran dari implementasi

kebijakan, maka diharapkan dapat menyesuaikan pola-pola perilaku dengan kebijakan yang telah dirumuskan. Dari penjelasan tersebut kita harus mengetahui siapa saja yang menjadi target dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum tersebut. Sasaran utama dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum karena masyarakatlah yang akan berdampak langsung dari kegiatan dan teknis dalam pelaksanaan Renstra yang telah menjadi visi misi utama kepala daerah.

Untuk merancang suatu rancangan pembangunan lima tahun ke depan Dinas Pekerjaan Umum juga melakukan komunikasi dengan masyarakat walau tidak secara langsung tetapi Dinas Pekerjaan Umum juga menerima saran dan masukan dari masyarakat melalui usulan-usulan yang di kiri masyarakat melalui proposal dan ada juga melalui email dan media sosial yang ada. Realisasi Renstra yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara sudah berjalan dengan baik sesuai dengan program dan kegiatan tetapi adanya pemotongan anggaran yang diajukan membuat dinas harus memulai evaluasi apa saja yang harus dikurangkan atau dipangkas dengan memilih kegiatan-kegiatan yang memang lebih penting. Memiliki sumber daya manusia yang berkualitas akan membuat kegiatan menjadi baik efektif. Adanya aturan baru yang timbul sesudah persetujuan dilakukan akan menghambat pelaksanaan kegiatan Renstra.

Implementasi Organisasi Pelaksana

Organisasi pelaksana merupakan badan-badan pelaksana yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan. Dengan adanya suatu visi misi maka penyusunan Renstra SKPD Dinas Pekerjaan Umum Bengkulu Utara pada tahun 2016-2021 harus sudah sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan.

Implementasi kegiatan Renstra sudah dilaksanakan dengan baik dengan peraturan dan prosedur yang ada tetapi implementasi Renstra yang mempunyai hambatan teknis tetapi tidak mengurangi apa yang menjadi tujuan dalam Renstra. Selain itu implementasi Renstra masih memiliki hambatan baik teknis maupun administrasi. Contohnya banyaknya keluar aturan baru, berkurangnya dana yang diajukan dalam Renstra tersebut hingga membuat implementasi Renstra tidak berjalan dengan efektif.

Implementasi Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan merupakan unsur-unsur di dalam lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan seperti aspek budaya, sosial, ekonomi dan politik. Dalam realisasi Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara masih ada kelompok masyarakat yang tidak mendukung kegiatan Renstra hingga kegiatan Renstra ada yang terhambat hingga mengurangi efisiensi waktu untuk melaksanakan kegiatan Renstra masyarakat sangat terbantu dengan adanya pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tetapi masih saja ada masyarakat yang menghambat kinerja dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari uraian pembahasan sebelumnya maka penulis dapat mengambil kesimpulan mengenai Analisis Implementasi Kebijakan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA-SKPD) pada Dinas Pekerjaan Umum dalam menunjang pembangunan Kabupaten Bengkulu Utara yaitu sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan dalam indicator kebijakan yang disesuaikan (*Idealized*

policy) implementasi kebijakan Renstra di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sudah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada, semua tehnik perancangan Renstra untuk merancang kegiatan untuk lima tahun kedepan. Dalam indicator kelompok sasaran (*Target groups*) implementasi kebijakan Renstra telah sampai pada tujuan yaitu masyarakat walaupun masih ada beberapa hambatan yang membuat kinerja implementasi Renstra tidak berjalan dengan lancar. Dalam Indikator organisasi pelaksana (*Implementing organization*) implementasi Renstra masih memiliki hambatan baik teknis maupun administrasi. Contohnya banyaknya keluar aturan baru, berkurangnya dana yang diajukan dalam renstra tersebut hingga membuat implementasi Renstra tidak berjalan dengan efektif. Dan dalam indikator faktor lingkungan (*Environmental factors*) terlihat masih adanya kelompok masyarakat yang tidak mendukung kegiatan Renstra hingga kegiatan Renstra ada yang terhambat hingga mengurangi efisiensi waktu untuk melaksanakan kegiatan Renstra.

2. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat dilihat bahwa faktor penghambat dalam implementasi kebijakan Renstra adalah faktor sosial budaya yang ada di masyarakat termasuk didalamnya adalah perilaku yang tidak mendukung pembangunan yang telah dan atau dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Allison, Michael, 2005. *Perencanaan Strategi*. Jakarta, Prenada Media Group
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta, Graha Ilmu

- Gitosudarmo, Indriyo. 2008, *Manajemen Strategis*. Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada
- Sutinah, Bagong Suyanto. 2005, *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta, Prenada Media Group
- Purwanto, Iwan, 2006. *Manajemen Strategi*. Bandung, Yeramawidya
- Abdurrahman, Soejono. 2005. *Metode Penelitian : Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta, PT. Rineka Cipta dan PT Bina Adiaksaka
- Handoko, Hani. 2012, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada.
- Sugiono. 2011. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung, Alfabeta
- Mihrip, Sabri. 2003. *Rencana Strategis Pembangunan*. Bengkulu, Dinkes
- Todaro, Michalel.P. 2000. *Pembangunan Ekonomi 2*. Jakarta, PT BumiAksara
- Sukirno, Sadono. 2006. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta, Kencana Kenada Media Group
- PeraturanPerundang-undang :**
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2006-2026
- Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 34 Tahun 016 Tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi, Tugas pokok dan Fungsi, Tata kerja dan Eselon Jabatan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang tipe B
- Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Daerah
- Jurnal dan Penelitian Ilmiah:**
- Masriani. 2017. *Implementasi Kebijakan Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Anak-Anak Pengemis Di Kecamatan Mandau)*. Riau, Universitas Riau Kampus Bina Widya
- Lukman, Dwi Jayanti. 2015. *Implementasi Kebijakan Perpajakan Di Kota Makassar*. Makassar, Jurnal Peneltian
- Krisdayanti, Adinda Dwi Ayu. 2018. *Perencanaan Strategis Dalam Upaya Peningkatan Daya Saing Di Qiswah Indonesia*. Surabaya, UIN Sunan Ampel